



**SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
DALAM
PEMBUKAAN RAPAT KOORDINASI
KEBIJAKAN BIDANG SOSIAL PROVINSI JAMBI
TAHUN 2022**

Kamis, 16 Juni 2022

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera bagi Kita Semua**

Yang Saya Hormati:

- Kepala OPD terkait lingkup Pemerintah Provinsi Jambi;
- Kepala Kantor Statistik Provinsi Jambi;
- Kepala Balai Alyatama Kemensos RI;
- Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
- Kepala Bappeda Kabupaten/Kota;

- Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten/Kota;
- Pengurus Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Provinsi Jambi;
- Pengurus Lembaga Lanjut Usia Indonesia Provinsi Jambi;
- Undangan dan Hadirin semua

Salam sehat untuk kita semua

Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya, kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dapat hadir dan bersilaturahmi dalam

Pembukaan Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Sosial Provinsi Jambi Tahun 2022.

Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua termasuk golongan yang menerima syafaatnya di akhirat kelak.

Amin

Hadirin dan hadirat yang saya hormati,

1. Saya menyambut baik dan menilai penting pelaksanaan Rapat Koodinasir ini, karena rakor ini memiliki arti strategis untuk merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk masyarakat Jambi.
2. Penanganan kesejahteraan sosial ini telah dilakukan Pemerintah sejak zaman kemerdekaan, hal ini tertuang dalam Pancasila yakni sila kelima menyebutkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, ini berarti bahwa pemerintah menghendaki agar masalah-masalah sosial dapat tertangani dengan baik.
3. Penanganan kesejahteraan sosial ini menjadi prioritas oleh Pemerintah Provinsi Jambi, sesuai Visi ***"JAMBI MANTAP"***, Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di Bawah Ridho Allah SWT, Salah satu program

unggulan yang dikururkan adalah DUMISAKE, dengan lima pilar:

- a. Jambi Cerdas,
- b. Jambi Sehat,
- c. Jambi Tangguh,
- d. Jambi Agamis, dan
- e. Jambi Responsif.

4. Saat ini regulasi mengenai kesejahteraan sosial telah banyak dibuat, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Hal ini agar dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini dapat dilakukan berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Adapun prioritas penangan kesejahteraan sosial ini diperuntukkan bagi mereka yang memiliki

kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan seperti :

- Kemiskinan
- Terlantar
- Disabilitas
- Keterpencilan
- Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku
- Korban bencana dan
- Korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Hadirin dan hadirat yang berbahagia,

5. Sejak terjadinya Pandemi Covid-19, Indonesia mengalami kerawanan sosial. Pembatasan sosial atau *social distancing* membuat kegiatan perekonomian melemah, produktivitas menurun sangat signifikan, pelaku usaha merugi, banyak pekerja yang di-PHK dan jual beli masyarakat

melemah, dan tingkat kemiskinan meningkat dengan tajam. Untuk itu Pemerintah berusaha keras mengatasinya. Berbagai cara ditempuh untuk menangani masalah-masalah ini, berbagai jenis bantuan dari pemerintah dikururkan antara lain:

- Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai;
- Kartu Prakerja
- Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
- Bantuan Langsung Tunai Minyak Goreng
- Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung
- Bantuan Langsung Tunai UMKM dan
- Bantuan Subsidi Upah.

6. Penyaluran bantuan tersebut mengalami banyak kendala yang dihadapi, seperti Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial yang tidak *update* dan tidak valid, sehingga banyak terjadi penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran.

7. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini, saya berharap melalui rakor ini dapat dilakukan sinergi dan sinkronisasi antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan mengambil langkah-langkah sinergis dalam penyusunan data terpatu kesejahteraan sosial serta data lainnya yang berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial.
8. Untuk itu, saya menekankan kepada para peserta Rakor untuk menggunakan kesempatan ini dengan optimal memberikan masukan dan saran konstruktif sehingga mampu menghasilkan rumusan rakor yang berarti untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat Provinsi Jambi.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Dengan memohon ridho Allah SWT dan diiringi ucapan ***"Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Koordinasi Kebijakan Bidang Sosial Provinsi Jambi Tahun 2022, secara resmi saya nyatakan dibuka.***

Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan.

**Wabillahitaufiqwalhidayah
Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.**

SEKRETARIS DAERAH,

H. SUDIRMAN, S.H., M.H.